

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada 1998 silam, Indonesia diterjang badai krisis ekonomi. Saat itu hanya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mampu bertahan dari goncangan krisis ekonomi. UMKM hadir menjadi penyelamat dengan menciptakan lapangan kerja baru. Terbukti dari data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik bahwa UMKM mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja. Pasca krisis moneter 1998, pemerintah menilai bahwa UMKM memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional, dimana UMKM dapat dijadikan sebagai tumpuan perekonomian Indonesia di masa yang akan datang. Menyadari hal itu, pemerintah langsung memberikan perhatian besar untuk UMKM dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 sebagai payung hukum UMKM agar gerak UMKM menjadi semakin leluasa (Wijaya, 2018:1-8). Berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dijelaskan bahwa UMKM adalah usaha perseorangan atau badan usaha dengan kriteria total aset dan total omzet sebesar Rp 50.000.000 dan Rp 300.000.000 untuk usaha mikro; antara Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000 dan antara Rp 300.000.000 sampai dengan Rp 2.500.000.000 untuk usaha kecil; dan antara Rp 500.000.000 sampai dengan Rp 10.000.000.000 dan antara Rp 2.500.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000.000 untuk usaha menengah (Ningtyas, 2017).

Dari tahun ke tahun, jumlah UMKM terus bertambah. Tercatat total pelaku UMKM yang ada di Indonesia telah mencapai 56,54 juta unit. Kontribusi UMKM di perekonomian nasional terhitung cukup besar. UMKM telah menyumbang hingga 57 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), artinya UMKM di Indonesia berkembang dengan pesat (LPPI dan Bank Indonesia, 2015). Tidak heran jika pemerintah pusat memberikan dukungan besar kepada UMKM dan gencar membuat bisnis UMKM semakin maju. Salah satu bukti dukungan pemerintah

pusat kepada UMKM adalah dengan memangkas tarif pajak. Pada tanggal 22 Juni 2018, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengumumkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final baru untuk UMKM, dari semula 1 persen menjadi 0,5 persen. Kebijakan yang diambil berdasarkan masukan masyarakat tersebut diefektifkan per 1 Juli 2018. Tarif 0,5 persen dikenakan bagi Wajib Pajak (WP) yang peredaran brutonya (omzet) sampai dengan 4,8 miliar rupiah dalam satu tahun. Pemerintah berharap dengan beban pajak yang semakin kecil, pelaku UMKM dapat memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan usahanya dan melakukan investasi (Kemenkeu, 2018).

Kendala yang sering dihadapi UMKM adalah masalah pendanaan dan pengelolaan keuangan. UMKM sulit mendapatkan pembiayaan perbankan atau kredit, karena banyak UMKM yang masih belum memiliki laporan keuangan. Pengajuan kredit membutuhkan laporan keuangan untuk menilai kondisi usaha dan untuk memperkirakan jumlah kredit yang akan diberikan (Wijaya, 2018:16). Laporan keuangan merupakan produk akhir yang dihasilkan melalui siklus akuntansi dengan mencatat dan mengikhtisarkan setiap transaksi bisnis, dimana tujuan penyusunan laporan keuangan tersebut adalah untuk memberikan informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi (Hery, 2015:5-6). Laporan keuangan yang baik adalah laporan yang disusun secara sistematis sesuai dengan peraturan akuntansi yang berlaku umum.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyadari bahwa format laporan keuangan yang umum tergolong cukup rumit untuk disusun oleh pelaku UMKM yang notabene kurang memahami tentang pencatatan akuntansi. Tahun 2016, IAI menyusun standar keuangan yang sederhana, yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK-EMKM) sehingga pelaku UMKM dapat menyusun laporan keuangan dengan mudah. SAK EMKM mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2018.

Penelitian ini mengambil UMKM Kerupuk Udang Sinar Jaya Sidoarjo sebagai objek penelitian. UMKM Kerupuk Udang Sinar Jaya Sidoarjo berdiri sejak dan berlokasi di Porong, Sidoarjo. Latar belakang dari pemilihan lokasi UMKM tersebut adalah pertama, ingin membantu UMKM Kerupuk Udang Sinar Jaya

Sidoarjo untuk mengembangkan bisnisnya. UMKM Kerupuk Udang Sinar Jaya Sidoarjo memiliki potensi baik, sayangnya karena keterbatasan kemampuan dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan, UMKM ini sulit berkembang. Kedua, lokasi UMKM Kerupuk Udang Sinar Jaya Sidoarjo strategis dan mudah diakses dari jalan raya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan pemilik, keuntungan dari berbisnis kerupuk udang dapat mencapai Rp 90.000.000 per bulan. Angka tersebut kurang akurat, karena sang pemilik mengakui bahwa tidak menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku, sehingga total pendapatan dan total biaya yang dicatat bukanlah angka yang sebenarnya. Pemilik kurang memahami sistem pencatatan akuntansi dan tidak memiliki waktu luang untuk menyusun laporan keuangan karena pemilik turut bekerja dalam proses produksi. Tidak adanya laporan keuangan membuat pemilik tidak dapat mengevaluasi kinerja bisnis yang dijalankannya serta mengakibatkan pemilik sulit untuk melakukan ekspansi bisnis. Perluasan bisnis membutuhkan dana yang cukup besar, umumnya pelaku bisnis akan mengajukan pinjaman kepada bank, oleh karena itu dibutuhkan adanya laporan keuangan untuk meyakinkan pihak bank bahwa bisnis tersebut layak diberi pinjaman. Pemilik juga akan kesulitan untuk membuat Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak, karena tidak tahu total penghasilan yang harus dicantumkan di formulir SPT.

Melihat fenomena UMKM Kerupuk Udang Sinar Jaya Sidoarjo yang belum bisa menyusun laporan keuangan sesuai standar, diadakan penelitian dengan judul “Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK-EMKM) (Studi Kasus di UMKM Kerupuk Sinar Jaya Sidoarjo)”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana penyusunan laporan keuangan pada UMKM Kerupuk Sinar Jaya Sidoarjo.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk membantu UMKM Kerupuk Sinar Jaya Sidoarjo dalam memahami proses penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Porong, Sidoarjo. Penelitian yang dilakukan berupa studi kasus dengan obyek penelitian di UMKM Kerupuk Udang Sinar Jaya Sidoarjo. Penelitian dilakukan dengan menganalisis aktivitas keuangan UMKM Kerupuk Udang Sinar Jaya Sidoarjo untuk penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK-EMKM.

1.5 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Akademis

Bagi dunia pendidikan, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangkan data empiris bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan sebagai informasi bagi rekan-rekan mahasiswa dalam mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai standar akuntansi keuangan.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada pelaku UMKM mengenai penyusunan laporan keuangan untuk mempermudah melakukan pengembangan UMKM terutama dari permodalan.

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi terdiri dari 5 bab, yaitu:

BAB 1: PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan berupa fenomena yang akan diteliti berisi penjelasan mengenai fenomena yang terjadi yang akan diteliti dan konsep teoritis berisi penjelasan mengenai konsep-konsep teori dan kajian data sebelumnya.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan dengan pendekatan penelitian berisi penjelasan mengenai alasan pemilihan pendekatan tersebut, model pendekatan kualitatif yang dipilih. Dalam bab ini juga ditentukan setting atau situs penelitian, jenis dan sumber data, alat dan metode pengumpulan data, teknik transferability, trustworthiness dan dependability, analisis data.

BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan gambaran umum setting atau situs penelitian, proses pencarian dan penemuan informan, hasil analisis data, pembahasan.

BAB 5: PENUTUP

Pada bab ini hanya diberikan kesimpulan yang ditarik peneliti dari pembahasan masalah.